



Implementasi Program Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak (DRPPA) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango

The Implementation Of The Women Friendly And Child Caring Village (Drppa) Program In Tinelo Village

Ariandi Saputra^{1*}, Sandi Prahara², Swastiani Dunggio³

¹Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo

²³Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo

Ariandi02saputra@gmail.com*, sandyprahara329@gmail.com, swastianidunggio83@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Implementasi program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Tinelo Kecamatan Tilango. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode Penelitian studi kasus ini menggunakan penelitian pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dikatakan bahwa sesuai program pencegahan kekerasan anak dan perempuan berupa komunikasi, informasi dan edukasi diselenggarakan oleh DRPPA berupa sosialisasi sudah dikatakan baik. Selain itu, secara umum implementasi kebijakan program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di DRPPA Desa Tinelo berlangsung dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari komunikasi, terjalannya komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan maupun para pelaksana kebijakan program pencegahan kekerasan terhadap anak di DRPPA Desa Tilango.

Kata kunci: Implementasi; Program; Ramah; Perempuan; Anak

Abstract

This study aims to examine the implementation of the Women-Friendly and Child-Caring Village (DRPPA) program in Tinelo Village, Tilango District. This research employs a qualitative descriptive approach with a case study method. The results indicate that the prevention programs for violence against women and children conducted through communication, information, and education by the DRPPA in the form of socialization have been implemented effectively. Furthermore, the overall implementation of policies regarding the prevention of violence against women and children in Tinelo Village's DRPPA is proceeding well. This is evidenced by the effective communication established between policymakers and policy implementers, as well as among the implementers of the child violence prevention program within the DRPPA of Tinelo Village.

Keywords: Implementation; Program; Friendly; Women; Child

I. PENDAHULUAN

Kekerasan adalah perilaku manusia yang tidak pantas untuk dilakukan dan menimbulkan penderitaan. Tindak kekerasan lebih banyak dialami oleh anak dan perempuan dan telah menjadi permasalahan global yang hingga kini masih menjadi perhatian serius berbagai negara, termasuk Indonesia. Faktor ini disebabkan pola pendidikan masyarakat tentang relasi perempuan dan laki – laki tidak setara dan masih kentalnya budaya patriarki di masyarakat. Menurut

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, kekerasan merupakan segala tindakan fisik, psikologis, seksual, atau penelantaran yang ,menimbulkan rasa sakit atau penderitaan bagi anak dianggap sebagai kekerasan. Perilaku ini juga mencakup perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, pemaksaan, dan ancaman. Menurut perkiraan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, perempuan dan anak-anak mencakup sekitar 43% dari populasi Indonesia, atau 65,2% dari total populasi. Jumlah yang substansial ini menawarkan potensi yang besar untuk membantu strategi, inisiatif, dan tindakan pembangunan, seperti yang bertujuan untuk mencapai pembangunan desa berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia yang unggul di desa mendorong pembentukan pusat-pusat pembangunan baru yang ramah perempuan dan anak (Wibisana dalam Fatimah, dkk, 2022 :2). Berdasarkan data dari Kejaksaan Tinggi Negeri Kabupaten Gorontalo, sebanyak 22 kasus kekerasan pada anak dan perempuan terjadi di Kabupaten Gorontalo sepanjang tahun 2022 dengan didominasi kasus kekerasan seksual. Pada tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo mencatat kasus kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Gorontalo berjumlah 86 kasus. Berdasarkan data tersebut kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Gorontalo meningkat signifikan dari setiap tahunnya.

Menjamin keselamatan anak dan perempuan, khususnya dalam konteks lingkungan desa, pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak melakukan kolaborasi dengan organisasi PKK setiap desa membentuk Program Ramah Anak dan Perempuan guna menekan kasus kekerasan di setiap desa di Kabupaten Gorontalo. Pada observasi awal peneliti menemukan permasalahan dimana kenyataannya Program ramah anak dan perempuan di setiap desa khususnya masyarakat desa Tinelo Kabupaten Gorontalo masyarakat masih kurang memahami dan belum mengetahui mengenai program tersebut. Tentunya akan berdampak pada semakin tidak efektifnya pengetahuan dan tidak bertambahnya informasi masyarakat khususnya dalam program desa ramah perempuan dan peduli anak di desa yang menjadi proram pemerintah Kabupaten Gorontalo. . Sehingga warga masyarakat akan tidak tahu menahu apabila terjadi masalah kekerasan kekerasan pada anak dan perempuan dilingkungan desa mereka. Peran serta dan bantuan masyarakat dalam implementasi program sangatlah dibutuhkan dalam mensosialisasikan program desa ramah anak dan perempuan.

Meskipun demikian, kajian mengenai implementasi program DRPPA masih terbatas, khususnya yang menelaah secara mendalam bagaimana program ini dijalankan di tingkat lokal serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Sebagian penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek kebijakan secara normatif atau perlindungan hukum, sehingga belum memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas implementasi program berbasis desa. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian

(research gap) yang perlu dikaji lebih lanjut. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).

Setiap kebijakan harus mempertimbangkan substansi dari keadaan sasaran untuk membuat rekomendasi yang mempertimbangkan berbagai program yang dapat diterapkan sesuai dengan tujuan kebijakan. (Tahir, 2014:22). Kebijakan publik merupakan serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang mengupayakan baik tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Proses penilaian dilakukan dengan membandingkan implementasi kebijakan dengan keadaan dilapangan. Edward III menjelaskan empat faktor penentu dalam pengimplementasian suatu kebijakan publik yaitu : 1). Komunikasi dimana efektivitas pelaksanaan kebijakan publik sangat bergantung pada komunikasi. Pelaksanaan kebijakan yang efektif bergantung pada pemahaman yang jelas dari para pengambil keputusan tentang apa yang harus dilakukan. Kebijakan harus dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan dengan cara yang tepat, akurat, dan konsisten. Agar para pembuat kebijakan dan pelaksana memiliki pemahaman yang sama ketika menerapkan kebijakan di masyarakat dimana komunikasi sangatlah penting. Transmisi, kejelasan, dan konsistensi adalah tiga utama yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas faktor komunikasi. 2). Sumber daya merupakan faktor kedua agar implementasi kebijakan berhasil, sumber daya yang memadai harus tersedia. Edward III menegaskan bahwa sejumlah indikator sumber daya, termasuk personel (staf), informasi, wewenang, dan fasilitas pendukung, dapat digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik kebijakan diimplementasikan. 3) Keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh sikap atau disposisi para pelaksananya. Implementasi kebijakan yang efektif bergantung pada kesadaran para pelaksana akan tanggung jawab dan wewenang mereka. Edward III menyatakan bahwa perekrutan birokrat dan pemberian insentif merupakan contoh indikator variabel disposisi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang kebijakan yang dibuat oleh para pengambil keputusan sangat penting bagi para pelaksana. 4) Implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh organisasi birokrasi. Struktur organisasi tempat para pelaksana beroperasi dapat menghambat proses implementasi, meskipun mereka memiliki informasi yang memadai, niat baik, dan sumber daya yang memadai. Prosedur Operasi Standar (SOP) dan tingkat fragmentasi organisasi merupakan dua komponen penting dari sistem birokrasi ini.

II.METODE

Dalam penelitian ini, peneliti memilih jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena secara komprehensif melalui pengumpulan data yang mendalam. Penelitian ini melibatkan informan penelitian berjumlah lima orang yang erat kaitannya dengan Program Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Tinelo Kecamatan Tilango

yakni Kepala Desa, Penanggung Jawab program Ramah Perempuan dan Peduli Anak dari Anggota PKK berjumlah 2 orang dan masyarakat berjumlah 2 orang sebagai sumber data. Di lokasi penelitian, prosedur pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan, yaitu: (1) reduksi data, yakni proses pemilahan, penyederhanaan, dan pemfokusan data yang relevan dengan tujuan penelitian; (2) penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk narasi atau tabel sehingga mudah dipahami; dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses interpretasi data untuk menemukan makna serta memastikan kebenaran temuan melalui pengecekan ulang terhadap data yang diperoleh. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber (informan), berbagai metode (observasi, wawancara, dan dokumentasi), serta waktu yang berbeda. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat diuji konsistensinya sehingga meningkatkan validitas dan kredibilitas hasil penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perlindungan anak dan perempuan terdapat dua bagian penting yaitu pencegahan dan penanganan. Kedua kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya perlindungan. Akan tetapi, pencegahan seharusnya memiliki porsi yang lebih besar di banding penanganan. Hal ini dikarenakan kegiatan pencegahan dilakukan untuk menghindari terjadinya kekerasan anak. Sedangkan penanganan adalah kegiatan yang dilakukan setelah kekerasan itu terjadi. Oleh sebab itu, kegiatan pencegahan memiliki arti penting. Berikut wawancara dengan ketua DRRPA desa Tinelu Ibu Sartina:

“ kalo torang berbicara soal perlindungan anak dan perempuan, artinya torang melakukan pencegahan dan penanganan. Nah itu berarti pencegahan itu salah satu bagian dari perlindungan karena kekerasan, itu berarti juga berbicara soal perlindungan anak dan perempuan. Jadi perlindungan anak dan perempuan, kita ada dua bagian besar yaitu pencegahan dan penanganan”

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sebagai salah satu upaya perlindungan anak dan perempuan, kegiatan pencegahan diharuskan lebih diutamakan daripada kegiatan penanganan kekerasan. Hal ini dikarenakan program pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan dilakukan dengan serangkaian tindakan-tindakan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya segala bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan yang dapat memberikan dampak buruk kepada anak korban kekerasan, seperti luka fisik, psikis bahkan kematian. Oleh karena itu, untuk menghindari kekerasan yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi anak dan perempuan, penting sekali dilakukan tindakan pencegahan dini kekerasan terhadap anak. Tindakan- tindakan tersebut dapat berupa kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi

1. KOMUNIKASI

Implementasi sebuah kebijakan khususnya program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, komunikasi adalah suatu terpenting untuk melihat sukses atau tidaknya program tersebut berjalan. Kebijakan Edward adalah penyampaian pesan atau informasi mengenai kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Berikut wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Desa Tinelo:

“setiap desa di Kabupaten Gorontalo dibentuk program DRPPA dimana diawasi langsung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak khususnya di Desa Tinelo. Pengurunya dilantik oleh Ketua Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo beranggotakan anggota PKK yang ada di Desa Tinelo. Untuk komunikasinya Kepala Desa dan Pengurus DRPPA desa Tinelo selalu melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Gorontalo yang bertujuan bertukar informasi mengenai kebijakan yang akan disosialisasikan”

Dari hasil wawancara diketahui bahwa rapat koordinasi adalah bentuk komunikasi yang dilakukan antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Gorontalo, Kepala Desa Tinelo dan Pengurus DRPPA. Rapat Koordinasi bertujuan keseragaman dalam menjalankan program di semua desa. Komunikasi kebijakan tidak hanya melalui rapat koordinasi tetapi juga workshop atau seminar yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Gorontalo dimana pesertanya yaitu Pengurus Program DRPPA setiap desa. Hal ini didapatkan oleh peneliti dari wawancara dengan anggota DRPPA Desa Tinelo Ibu Mayang Uloli:

“kami biasanya diundang ke Limboto di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak untuk mengikuti sosialisasi atau seminar mengenai program penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mereka memberikan pemahaman mengenai program DRPPA untuk kami lakukan sosialisasi kepada masyarakat.”

Rapat koordinasi bertujuan juga sebagai bahan evaluasi dimana melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Gorontalo, pemerintah desa dan pengurus DRPPA desa Tinelo. Rapat evaluasi tersebut membahas sejauh mana program tersebut berjalan dan menilai program khususnya target kebijakan yaitu masyarakat. Seperti yang diungkapkan Kepala Desa Tinelo kepada Peneliti:

“kami selalu rapat bersama untuk mengevaluasi sejauh mana program ini dapat dipahami masyarakat karena mereka yang mendapatkan pelayanan. Rapat koordinasi juga membantu untuk mengukur kami berhasil atau tidak menjalankan program DRPPA”

Pernyataan kepala desa Tinelo pun sama dengan hasil wawancara peneliti dengan Ketua DRPPA Ibu Sartina

“setiap kegiatan yang kami lakukan selalu kami evaluasi dimana kekurangannya dan akan dilaporkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Kepala Desa Tinelo, bagaimana penerapan program sesuai harapan mereka atau belum.”

Hal ini menunjukkan bahwa dimensi komunikasi dalam implementasi kebijakan menurut Edward III telah terpenuhi. Komunikasi yang dilakukan melalui rapat koordinasi secara rutin antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, pemerintah desa, dan pengurus DRPPA mencerminkan adanya kejelasan informasi (clarity), konsistensi pesan (consistency), serta transmisi informasi (transmission) yang berjalan dengan baik. Dengan adanya koordinasi tersebut, pelaksana kebijakan memperoleh pemahaman yang sama terkait tujuan, mekanisme, dan arah kebijakan, sehingga meminimalisir terjadinya distorsi informasi dalam implementasi program DRPPA di Desa Tinelo.

Komunikasi antara pemerintah desa Tinelo dan pengurus DRPPA dalam bentuk rapat evaluasi tersebut dilakukan setiap sebulan sekali. Rapat evaluasi tersebut terkadang melibatkan unsur tokoh perempuan dan organisasi kemasyarakatan. Dalam rapat evaluasi tersebut akan membahas dan menilai program-program termasuk di dalamnya program pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan di desa Tinelo. Dalam rapat tersebut, penilaian dari organisasi masyarakat dan tokoh perempuan sebagai kelompok sasaran juga penting sebagai bahan evaluasi. dalam rapat evaluasi yang dilakukan, keterlibatan organisasi masyarakat penting dalam memberikan penilaian terhadap program berjalan baik. Hal ini dilakukan agar informasi yang didapatkan menjadi seimbang.

2. SUMBER DAYA

Pelaksanaan kebijakan program DRPPA Desa Tinelo tidak mengalami permasalahan. Hal ini seperti diungkapkan oleh Ibu Sartina selaku ketua Pelaksana Program, yaitu:

“kami tidak mengalami kendala dalam hal SDM. Sejauh ini semua memadai dan dapat berjalan dengan baik. Ini karena kita fleksibel yah karena kami beranggotakan 3 orang ”

Sumber daya manusia yang digunakan baik dari segi kualitas dan kuantitas sudah disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program. Hal ini sesuai dengan penuturan dari Ibu Mayang Uloli, yaitu:

“Misalnya saya mau melakukansosialisai, yang bisa membantu kita menjalani sosialisasi yaitu relawan yang ditugaskan dari pemerintah kabupaten relawan.

Contoh berbicara tentang hukum, saya ambil itu relawan hukum maksudnya orang yang mempunyai sarjana hukum. Tentu saja kami ambil narasumber tersebut yang sudah berpengalaman di bidangnya masing – masing. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Kapasitas mereka, ga asal juga.”

3. SIKAP (DISPOSISI)

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh bagaimana karakteristik implementor dan objek kebijakan dengan berbagai permasalahan yang dihadapinya. Perbedaannya dapat dilihat misalnya dari aspek lokasi geografis, sosial ekonomi, sosial budaya, besar kecilnya sasaran implementasi kebijakan.

Berdasarkan hal tersebut mengenai sikap para pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan di kalangan instansi pemerintah, peneliti menemukan bahwa adanya sikap yang positif dan mendukung terhadap terlaksananya kebijakan program pencegahan kekerasan terhadap anak. Pelaksana kebijakan program pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan di desa Tinelo mengkoordinir program-program untuk dilaksanakan secara nyata ke dalam masyarakat

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, para pengurus DRPPA menjalankan tugasnya dengan baik. Sikap yang ditunjukkan oleh para DRPPA dalam menjalankan program pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan juga dinilai baik. Hal ini ditunjukkan dengan kesiapan mereka dalam melaksanakan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan di desa Tinelo. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari ibu Mayang Uloli, berikut ini:

“kami selalu, harus siap ditunjuk untuk kegiatan pencegahan, misalnya sosialisasi secara langsung ke masyarakat. Tornag pasti siap dan bertanggung jawab”

Berdasarkan wawancara di atas, pengurus DRPPA mempunyai sikap yang baik dalam melaksanakan program pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Pengurus tersebut memiliki kesiapan dan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan terkait pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan.

4. STRUKTUR BIROKRASI

Struktur birokrasi dari organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan mempunyai pengaruh penting pada implementasi kebijakan program pencegahan kekerasan terhadap anak. salah satu dari aspek-aspek struktural yang paling mendasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja. peneliti melihat bahwa pelaksanaan kebijakan program pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan yang dilalalkan oleh DRPPA di Desa Tinelo

tidak mengalami pemecahan koordinasi pelaksana kebijakan dan pemecahan pertanggung jawaban. Walaupun pada pelaksanaannya di lapangan terdapat banyak pihak maupun instansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan program pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan, tetapi puncak koordinasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tetap berada pada Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Kabupaten Gorontalo. Hal tersebut seperti yang terlihat dalam kutipan wawancara dengan Kepala Desa Tinelo di bawah ini:

“ ...Kita ini koordinatornya dari pemerintah kabupaten yaitu dinas. Jadi DRPPA diawasi oleh mereka dan mereka sudah diberikan kewenangan untuk menjalankan program yang diketahui pemerintah desa rumah, tapi tetap bertanggung jawab kepada kita mengenai pelaksanaan programnya, kita juga yang melakukan fungsi kontrol ke mereka”

Berdasarkan petikan wawancara di atas dapat diketahui bahwa DRPPA desa Tinelo tetap melakukan pertanggungjawaban kepada pemerintah Kabupaten dalam hal ini dinas Perlindungan Anak dan Perempuan dan Pemerintah Desa Tinelo.

Dalam analisis yang pertama, peneliti melihat implementasi kebijakan program DRPPA di Desa Tinelo dari segi komunikasi. Komunikasi dalam konsep kebijakan Edward III adalah penyampaian pesan atau informasi mengenai kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Dalam hal ini, terjadi transfer pengetahuan mengenai kebijakan meliputi hakikat kebijakan, cara pelaksanaan, batasan-batasan norma, evaluasi terhadap kebijakan, dan lain sebagainya. Salah satu bentuk komunikasi antara pembuat kebijakan yaitu kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan pelaksana teknis yaitu pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak adalah rapat koordinasi.

Sumber daya manusia skills yang dimiliki oleh pengurus yang merupakan unsur penting dalam pelaksanaan program-program pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Hal ini terlihat jelas dalam anggota bertugas dalam memberikan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak sehingga harus memiliki skills yang baik. Dalam kegiatan sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan, sumber daya manusia yang digunakan seperti narasumber untuk sosialisasi dan penyuluhan serta pelatih untuk kegiatan pelatihan adalah orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya. Sumber daya manusia yang digunakan baik dari segi kualitas dan kuantitas sudah disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program.

Selain itu, menurut Edwards III, informasi juga terkait dengan bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Pelaksana -pelaksana perlu mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya. Dengan demikian para pelaksana kebijakan harus diberi petunjuk untuk melaksanakannya.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam komunikasi, petunjuk pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan dari pembuat kebijakan sudah diberikan kepada pengurus DRPPA dan Pemerintah Desa Tinelo dalam bentuk rapat koordinasi. Pada pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan, pengurus DRPPA Desa Tinelo sudah memiliki SOP dalam pelaksanaan program-programnya. Untuk sekarang ini, SOP sedang dalam tahap revisi. Akan tetapi, revisi hanya dilakukan pada pelaksanaan program penanganannya saja Hal ini dikarenakan adanya bentuk baku.

IV. KESIMPULAN

Program pencegahan kekerasan anak dan perempuan berupa komunikasi, informasi dan edukasi diselenggarakan oleh DRPPA berupa sosialisasi sudah dikatakan baik ini dibuktikan masyarakat umumnya mendapat respon positif. Selain itu, secara umum implementasi kebijakan program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di DRPPA Desa Tinelo berlangsung dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari komunikasi, terjalinnya komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan maupun para pelaksana kebijakan program pencegahan kekerasan terhadap anak di DRPPA Desa Tilango. Selanjutnya, sumber daya seperti staf, informasi, keuangan dan fasilitas mendukung pelaksanaan program tersebut. Bentuk dukungan dari Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan ikut mendukung pelaksanaan program agar berjalan dengan baik. Hal tersebut juga didukung dengan sikap dari para pelaksana kebijakan yang memiliki tanggung jawab dan komitmen yang kuat dari tugas yang diembannya. Dalam implementasi program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di DRPPA Desa Tilango terdapat beberapa kendala, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, tidak adanya dukungan dana maupun kerjasama dari pihak swasta padahal program pelayanan yang diberikan oleh DRPPA Desa Tilango diberikan secara gratis kepada masyarakat, fasilitas yang ada pun masih dirasa kurang oleh para pengurus. Hal tersebut menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak di DRPPA Desa Tilango.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino., Leo (2014) Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta
Ahmadi., Rulam (2014) Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta. Ar-Ruzzmedia.
Bara., Al (2019) Analisis Sistem Pengawasan MUI terhadap UMKM halal di kota Medan. Ekonomi Kawan : Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan. Vol 2 (17) :

- Fatimah,. Nurul. Yusro,.Mufida. Atiqotul Musyarofah (2022) Aktualisasi Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagai Strategi Akselerasi Pencapaian SDGs Desa Bangorejo Kabupaten Banyuwangi. MUJTAMA' Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol 3 No 1 Maret 2022
- Fitriati,.dkk (2023) Implementasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam Merealisasikan Lingkungan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kabupaten Nagan Raya. DIALOGUE Jurnal Ilmu Administrasi Publik UNDIP, Vol 5 No 2
- Hoeriyah., Riski. (2019) Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) di Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten. Jurnal Administrasi Publik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Banten
- Mufidah,. Makhrita. Dida Ramdanik. (2022) Implementasi Program Kalimasada melalui Aplikasi Klampid New Generation di Kantor Kelurahan Pagesangan Kota Surabaya. PRAJA Observer:Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol. 3 No. 01.
- Mulyadi., Deddy. (2018) Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung. Alfabeta.
- Saputra., Riyan .(2022) Implementasi Program Pendampingan Desa Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan. ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.1, No.5
- Tahir,. Arifin (2014) Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung. Alfabeta

.

.